

## **EKONOMI POLITIK INDONESIA SAAT INI, KEBIJAKAN, PENERAPAN SERTA TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO**

**Nenden Herawaty Suleman**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nendenherawaty@iain-manado.ac.id](mailto:nendenherawaty@iain-manado.ac.id)

**Ferdiansyah Parenrengi**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [ferdiansyahaan7@gmail.com](mailto:ferdiansyahaan7@gmail.com)

**Tirta Kurniawan Oelfa**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [tirtaoelfa111@gmail.com](mailto:tirtaoelfa111@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan dua focus yang berbeda. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia. Selain itu dalam penanganan terhadap adanya pandemi, dalam aspek ekonomi dan politik merupakan tantangan bagi pemerintah dan juga merupakan suatu hal yang penting. Penerapan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri, sebab dalam penerapannya perlu diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** Ekonomi; Kota Manado; Politik.

## PENDAHULUAN

Ekonomi politik merupakan suatu disiplin ilmu politik dimana pengertiannya dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap ahli, baik tu ahli politik maupun ahli ekonomi. Seperti menurut Marx yang dijelaskan dalam buku karya Barry dan Donald Wittman *the oxford handbook of political economy* ekonomi politik merupakan kepemilikan alat produksi yang bergantung pada proses sejarah. Sedangkan menurut Mochtar Mas' oed, ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Selain itu ekonomi politik juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan, dimana dalam perkembangan perkembangannya, ekonomi politik merupakan studi interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, atau sistem yang saling memengaruhi (Heliany, 2021).

Dalam studi ekonomi politik, terdapat beberapaperspektif dan konsep yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh John Locke, sebagai tokoh yang memelopori liberalisme berpendapat bahwa kebebasan harus dijadikan falsafah utama dalam kehidupan politik. Bagi John Locke, kebebasan dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas individu (Aida: 2015). Menurut John Locke, manusia sejatinya memiliki tiga hak dasar (mutlak) yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Perspektif liberalisme memiliki dua konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. Duakonsep tersebut adalah, pertama, asumsi rasional yang terdiri dari game theory, public choice theory, dan rational choice theory, dan kedua, international political economy (IPE). Konsep international political economy (IPE), merupakan studi mengenai bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah (Damayanthi, 2008).

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan kepada publik (negara, masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum). Dalam pembentukan kebijakan pemerintah, dilakukan berdasarkan tuntutan perkembangan zaman, dimana semakin berkembangnya zaman maka keperluan akan produk hukum semakin berkembang sesuai dengan zaman itu sendiri. Sepeti halnya yang terjadi pada zaman sekarang ini, adanya penyebaran virus covid-19 (*Corona virus disease 2019*) adanya menyebabkan virus ini menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari yang sangat signivikan, juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Untuk melindungi masyarakat negara mengeluarkan kebijakan pemerintahan, dimana kebijakan yang dikeluarkan mencakup beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, serta perekonomian.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan menjadi pusat perhatian masyarakat ialah kebijakan pemerintah mengenai perekonomian, dimana dalam penerapan serta pembuatan kebijakan tersebut, tentunya masih bersangkutan dengan ekonomi dan

juga politik. Dimana kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan guna untuk memulihkan ekonomi dan politik ditengah pandemi.

Berdasarkan dari adanya kebijakan-kebijakan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang kebijakan terhadap ekonomi politik, baik dari segi regulasi dan penerapannya terhadap masyarakat terutama yang berada di kecamatan Singkil, Manado Sulawesi Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 1999). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif. Dimana dalam pengumpulan data penulis lebih mengambil bentuk kata-kata dari pada angka-angka (Emzir, 2011) sehingga penulispun melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan library research, dimana penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, jurnal, buku, majalah, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi politik adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu yaitu ekonomi dan politik. ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan dua focus yang berbeda. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Lies Afroniyati, 2014).

### **Kebijakan Ekonomi politik di Indonesia pada masa pandemi**

Kebijakan dalam perekonomian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, mengingat banyak aspek yang besangkutan dalam perekonomian, serta banyanya pelaku perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatur segalanya. Sebab kebijakan dalam perekonomian merupakan hal yang mendasari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian baik dalam ruang lingkup kecil maupun luas. Hal ini juga tidak luput dari kebijakan terhadap ekonomi politik. Termasuk juga dengan kebijakan ekonomi politik pada masa pandemi.

Seperti yang diketahui, adanya penyebaran pandemi covid-19 ini melumpuhkan segala aktifitas di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Salah satu aspek yang terdampak oleh adanya pandemi ini ialah perekonomian, dimana covid -19 ini berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mengatur pertumbuhan perekonomian, guna untuk mencegah stabilitas keuangan negara. Pemerintahpun mengeluarkan berbagai kebijakan, adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni melakukan peningkatan investasi, guna untuk menekan laju perlambatan ekonomi.

Selain dalam aspek ekonomi, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan politik dimasa pandemi ini. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengeluarkan rancangan serta oenetapan *undang-undang cipta kerja (uu omnibuslaw)*. Dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, sayangnya kebijakan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Tidak hanya kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di tengah pandemi baik yang bersangkutan dengan ekonomi dan juga politik salah satunya kebijakan untuk tetap melaksanakan pemilihan Umum yang terjadi pada tahun 2020 (Damayanthi, 2008).

Banyaknya kebijakan-kebijakan tersebut, menimbulkan pertanyaan- pertanyaan dalam masyarakat luas, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keadaan ekonomi politik di tengah pandemi saat ini? Apakah perepapan dari kebijakan tersebut terealisasikan dengan baik.? Apakah adanya kebijakan-kebijakan ini dapat membantu serta menopang perekonomian baik itu perekonomian masyarakat ataupun negara?

Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, penulispun melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang berada Kota Manado, tepatnya di Kecamatan Singkil. Adapun hasil dari wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Narasumber pertama ialah Bapak Rivaldo Masiaga, saat kami temui di kediamannya, bapak rivaldo membagikan pendapatnya terhadap pertanyaan- pertanyaan di atas. Adapun tanggapan dari bapak Rivaldo yaitu:

“Menurut saya, untuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan keputusan yang tepat, dikarenakan dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang dirumahkan, tidak leluasanya pergerakan untuk melaksanakan pekerjaan seperti sebelumnya juga membuat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka” setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah bapak Rivaldo pun mengungkapkan sedikit kekecewaannya, “Akan tetapi yang disayangkan, dalam penerapan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat kekurangan yakni kurang tepatnya sasaran dari kebijakan tersebut. Sebut saja Kebijakan Kartu Prakerja yang dikeluarkan juga pada masa pandemi ini, terdapat oknum-oknum yang pada dasarnya telah memiliki kerja/sumber penghasilan namun masih juga mendaftarkan diri sebagai peserta kartu prakerja, sehingga target sebenarnya yakni untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan ada yang tidak terdaftar, seharusnya dalam hal ini, si pengeluar kebijakan tersebut harus lebih teliti lagi dalam penerimaan peserta kartu prakerja, tidak hanya itu, ada juga kebijakan seperti PSBB yang menurut saya tidak terealisasikan dengan baik.” Melanjutkan pendapatnya bapak Rivaldo mengutarakan beberapa saran “saya berharapnya kedepannya untuk kebijakan dari pemerintah, lebih matang lagi persiapannya, sehingga pada saat penerapan kebijakan kepada masyarakat, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, tujuan dari kebijakan tersebut juga dapat terwujud.”

Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Rivaldo, penulispun menarik kesimpulan dimana kebijakan yang telah dikeluarkan merupakan kebijakan yang bagus, akan tetapi dalam proses penerapannya masih mengalami kekurangan, sehingga kebijakan tersebut dinilai sasarannya kurang tepat.

Narasumber selanjutnya yang ditemui oleh penulis, ialah ibu Rahmi, ibu rumah tangga yang juga merupakan salah 1 masyarakat kecamatan singkil. Sama dengan bapak Rivaldo sebelumnya, penulis juga melakukan wawancara di rumah ibu Rahmi. Pertanyaan pertama yang ditanyakan yakni “*bagaimana pendapat ibu Rahmi mengenai kebijakan pelaksanaan pemilihan Umum yang dilakukan pada beberapa waktu lalu serta adanya kebijakan lainnya dari pemerintah tentang menghadapi pandemi,*” dengan sigap beliau menanggapi:

“Kalau soal Pemilu itukan pesta demokrasi kan, pastilah harus dilakukan, tapi pelaksanaannya serta kebijakannya saja yang saya sayangkan, kenapa disaat hari-hari besar agama kita dilarang melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, dan diperintahkan untuk melakukannya dirumah masing-masing atau melalui via online. Tapi kenapa disaat masa-masa pemilu kok pelaksanaan kampanye itu masih ada, padahal kan sudah ada kebijakan untuk tidak berkerumun di suatu tempat, lah kok calon wakil rakyat yang nantinya akan jadi pemerintah melupakan kebijakan tersebut dan tetap melakukan kegiatan yang menyebabkan adanya kerumunan. Hal itu sangatlah disayangi, apapun itu alasannya. Berpolitik boleh tapi kan saat ini kita sedang menghadapi pandemi.” Adapun pendapat dari ibu rahmi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu “kalau untuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu ada yang bagus namun ada juga yang masih kurang tepat jika dikeluarkan pada saat pandemi seperti ini, salah satunya yaitu kebijakan untuk tetap membuka tempat wisata, kan itu juga sama saja apa gunanya masyarakat dirumahkan, anak-anak sekolah dirumahkan dan belajar online, kalau tempat wisata masih tetap dibuka, kan itu juga menyebabkan adanya kerumunan, bahkan dari berbagai tempat dan daerah kan” melanjutkan wawancara, penulis pun menanyakan “*lantas bagaimana menurut ibu dengan kebijakan pemerintah lainnya seperti pemberian bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masarakat.?*” Menjawab pertanyaan itu ibu Rahmi mengatakan “kalau kebijakan bantuan itu, saya senang pemerintah mengeluarkannya, tapi sangat disayangkan dalam pembagian bantuan-bantuan tersebut masih ada yang tidak menerima, dan yang sngat disayangkan masyarakat yang tidak menerima itu merupakan masyarakat yang perekonomiannya lemah, yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak dapat. Entah yaa itu kurangnya informasi atau bagaimana saya juga penasaran dengan itu. Namun saya harap juga kedepannya pemerintah bisa lebih update lagi tentang data masyarakatnya, siapa yang pantas menerima bantuan dan siapa yang tidak. Dan tentunya saya juga harap corona ini bisa segera usai.” ujar ibu rahmi yang diakhiri dengan harapannya agar pandemi ini segera berakhir”.

Selain ibu Rahmi dan juga Bapak Rivaldo, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat lainnya, dimana hasil dari wawancara tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara terhadap bapak Rivaldo dan juga ibu Rahmi, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dari wawancara tersebut sebagai berikut: (1) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan kebijakan yang bagus pada saat ini; (2) Adanya kebijakan yang menyebabkan kerumunan masih tetap terjadi sangatlah disayangkan, adapun kebijakan itu seperti tetap dibukanya tempat wisata serta adanya Pelaksanaan Kampanye Pada saat pemilihan Umum. Walaupun keduanya bersangkutan dengan ekonomi dan politik negara namun hal itu disayangkan terjadi di tengah-tengah pandemi ini.

## KESIMPULAN

Ekonomi politik merupakan suatu aspek yang melekat dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, dalam penerapan kebijakan baik itu tentang perekonomian maupun politik pada masa pandemi merupakan satu hal yang penting dan harus dilakukan. Sebab dalam sebuah negara hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan pertumbuhan perekonomiannya. Adanya berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi politik ditengan-tengah pandemi seperti saat ini. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan penerapan kebijakan ekonomi politik pada saat pandemi seperti ini merupakan suatu keputusan yang tepat, sebab untuk menangani masalah penurunan ekonomi pada saat ini. Akan tetapi masi ada beberapa penerapan kebijakan yang dianggap kurang tepat sarannya, sehingga masih harus dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

## REFERENSI

- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1).
- Emzir, E. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1).
- Lies Afroniyati. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Public*, 18(1).
- Sugiono, S. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.